

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang

berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Seharusnya dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi pada pemikiran global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. (Abdullah piter dkk 2002) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional, Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Setiap upaya pengembangan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pengembangan ekonomi daerah pada umumnya dapat dimulai pada pengembangan pedesaan pada khususnya dan sektor pertanian karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah.

Salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi daerah adalah Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu Pengembangan Ekonomi Lokal juga merupakan suatu proses yang untuk mencoba merumuskan kelembagaan pembangunan di wilayah, peningkatan untuk kemampuan sumber daya manusia dan menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal (Munir, 2007).

Pengembangan Ekonomi yang bertumpu pada sumber daya lokal seperti ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat

lokal dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya Perekonomian Lokal, sehingga mampu bersaing dengan wilayah disekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban Untuk meningkatkan Pembangunan daerah terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Gorontalo merupakan Provinsi Agraris, dimana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Ini terlihat pada Tabel 1.1 Sektor Pertanian Provinsi Gorontalo.

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2016**

No	Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)		
		2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7698.32	8024.61	8540.21
2	Pertambangan dan Penggalian	283.11	294.31	294.54
3	Industri Pengolahan	843.80	883.13	941.22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.29	15.55	17.43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.25	10.50	12.05
6	Konstruksi	2470.12	2711.44	2849.32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2151.87	2275.22	2500.70

8	Transportasi dan Pergudangan	1207.88	1324.74	1410.38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	446.92	482.90	524.98
10	Informasi dan Komunikasi	587.23	644.77	710.71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	742.57	817.90	968.83
12	Real Estate	396.25	428.83	464.44
13	Jasa Perusahaan	20.19	21.32	22.57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1906.73	1978.49	1976.62
15	Jasa Pendidikan	894.72	958.61	994.83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.38	803.68	871.82
17	Jasa lainnya	374.18	392.59	406.48
	P D R B	20775.80	22068.59	23507.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Gorontalo dalam angka 2017

Provinsi dengan luas wilayah 12.435 km<sup>2</sup> ini memiliki hasil pertanian yang tidak kalah melimpah dengan Provinsi lain di Indonesia. Letak geografisnya yang berdekatan dengan garis khatulistiwa memberikan keuntungan tersendiri. Limpahan sinar matahari dan curah hujan yang cukup tinggi, membuat beberapa jenis tanaman dapat tumbuh subur. Dari data yang ada bahwa besarnya kontribusi sektor Pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Gorontalo selama 3 tahun terakhir terlihat pada Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2016**

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	38,32	37,55	37,44
2	Pertambangan dan penggalian	1,95	1,98	1,86
3	Industri Pengolahan	4,50	4,45	4,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	15,64	16,10	15,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,48	8,44	8,73
8	Transportasi dan Pergudangan	9,00	9,29	9,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,92	1,99	1,98
10	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,63	2,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	4,00	4,42
12	Real Estat	1,02	1,05	1,05
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	4,90	4,59
15	Jasa Pendidikan	3,24	3,22	3,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	2,87	2,90
17	Jasa Lainnya	1,38	1,38	1,33
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa sektor yang lebih menonjol adalah sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan dengan presentase pada tahun 2014 sebesar 38,32 dan pada saat tahun 2015 sebesar 37,55 hingga pada tahun 2016 sebesar 37,44.

Kondisi saat ini subsektor tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo sebagian besar hanya bergerak pada usaha budidaya (*on – farm*) berdasarkan analisis hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2013. Pengembangan Agribisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah pada komoditas unggulan tanaman pangan. Teknologi pasca panen yang seharusnya mampu meningkatkan nilai tambah produk belum bisa dilakukan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian yang berakibat rendahnya nilai tambah produk karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk bahan baku, sehingga penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian belum menikmati hasil yang maksimal walaupun sektor pertanian merupakan sektor unggul di Kabupaten Gorontalo. Dampak kinerja pengembangan tanaman pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Kabupaten Gorontalo. Pengembangan tanaman pangan dikelompokkan pada pengembangan komoditas utama seperti padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu.

**Tabel 1.3 Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2016**

Kabupaten	Tahun	SubSektor Tanaman Pangan Tahun 2014-2016				
		Padi Sawah	Jagung	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
		Produksi	Produksi	Produksi	Produksi	Produksi
Kab. Gorontalo	2014	147 299	125 565	0	0	0
	2015	153 515	142 863	4 004	600	320
	2016	0	0	0	0	0

**Sumber :** BPS Kabupaten Gorontalo 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dari Tahun 2014-2016 untuk subsektor tanaman pangan padi di Kabupaten Gorontalo lebih besar dimana produksi lebih dari 147.000 ton. Di bandingkan dengan nilai produksi yang ada di subsektor tanaman pangan jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

Dan beberapa penelitian yang terkait, Seperti Hasil penelitian Ratiza Rizkian Azwartika (2013) diperoleh dua komoditas unggulan pertanian yang potensial untuk dikembangkan yaitu komoditas padi dan jagung. Kedua komoditas tersebut merupakan komoditas yang berpotensi dan memiliki daya saing sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

Maka dari itu, dilihat dari item yang ada di dalam subsektor tanaman pangan yaitu : Padi sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar manakah yang bisa menghasilkan nilai guna yang bisa memberikan kontribusi dan hasil yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Sehingga penulis



perlu melakukan penelitian yang komprehensif yang dituangkan dalam judul ***Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2016.***

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. komoditas apa yang termasuk dalam kategori komoditas bahan pangan unggulan di Kabupaten Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penentu komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo ?

### **1.2 Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui komoditas Tanaman Pangan yang termasuk dalam kategori komoditas bahan pangan unggulan di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan penentu komoditas bahan pangan unggulan di Kabupaten Gorontalo.

### **1.3 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Secara Praktis**

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten gorontalo dan pihak yang terkait dalam menentukan arah, kebijakan dan strategi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan potensi sumber daya.

2. Sebagai bahan pelengkap bagi penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Sebanyak referensi bagi penulis lain yang mempunyai keterkaitan untuk mengembangkan penelitiannya.

### **1.3.2 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuandi bidang ekonomi regional dan lebih khusus tentang potensi unggulan subsektor tanaman pangan yang ada di Kabupaten Gorontalo.